

RINGKASAN ABSTRAK

Schemes to the Effective Implementation of Green Fiscal Policy in Indonesian Forestry Sector¹

Oleh

Nurrochmat, D.R., Ekayani, M., dan A. Hadianto²

Selama lebih dari tiga dekade sumberdaya hutan Indonesia terus menerus dieksploitasi yang bermuara pada tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan. Tingkat kerusakan hutan Indonesia sangat tinggi dan cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dengan semakin menipisnya cadangan sumberdaya hutan pada saat ini, dimana luasan hutan Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun, maka pencapaian cita-cita pembangunan berkelanjutan layak untuk dikhawatirkan.

Ada tiga permasalahan mendasar yang (diduga) menyebabkan semakin rusaknya sumberdaya hutan Indonesia, yaitu: pertama, kebijakan fiskal terkait pemanfaatan sumberdaya alam yang berlaku saat ini cenderung bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan kepentingan pelestarian sumberdaya alam dan nilai jasa lingkungan. Kedua, sistem neraca pembangunan belum disusun dengan memperhatikan kaidah pengelolaan lingkungan, sehingga rusaknya hutan dan berkurangnya sumberdaya alam lainnya tidak terpantau dengan baik. Ketiga, kegiatan valuasi ekonomi sumberdaya alam belum dapat bertransformasi menjadi nilai ekonomi riil yang terintegrasi dalam neraca pembangunan.

¹ Dibiayai melalui Hibah Kompetitif Penelitian Untuk Publikasi Internasional Tahun 2009, Rp 40 juta

² Dosen Departemen Manajemen Hutan Institut Pertanian Bogor, Departemen Ekonomi Sumberdaya & Lingkungan Hutan Institut Pertanian Bogor, dan Departemen Ekonomi Sumberdaya & Lingkungan Hutan Institut Pertanian Bogor

Jasa lingkungan merupakan barang publik yang hingga saat ini tidak ada (sangat jarang) transaksi pasarnya. Hal ini disebabkan karena belum ada mekanisme baku yang mengatur pembayaran terhadap jasa lingkungan yang bersifat sebagai barang publik. Akibatnya, kepedulian masyarakat dan pengambil keputusan terhadap pelestarian lingkungan sangat rendah dan cenderung melakukan eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam untuk mengejar keuntungan jangka pendek (*short-return*). Kajian ini berusaha mengidentifikasi kebijakan-kebijakan fiskal yang tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan dan merumuskan sistem neraca pembangunan yang mengintegrasikan nilai tambah produksi, deplesi, degradasi, dan nilai ekonomi jasa lingkungan.

Kajian ini mencakup rekomendasi kebijakan fiskal yang ramah lingkungan (*green fiscal policy*) yang dapat mentransformasikan nilai ekonomi potensial menjadi nilai ekonomi riil yang rasional, terukur, dan dapat diterima oleh para pihak. Dalam penghitungan neraca pembangunan konvensional, konsep yang digunakan adalah konsep nilai tambah. Nilai tambah merupakan perbedaan nilai suatu barang/jasa yang timbul sebagai akibat suatu kegiatan produksi dan/atau distribusi serta dinilai menurut harga pasar. Jasa lingkungan hutan berupa kemampuan menahan air, menahan banjir, menahan erosi, sebagai tempat hidup keanekaragaman hayati, maupun sebagai penyerap karbon; yang semuanya itu saat ini tidak ada atau sangat kecil transaksi pasarnya. Dengan demikian nilai ekonomi dari berbagai jasa lingkungan itu tidak ditampilkan di dalam neraca pembangunan.

Jasa lingkungan selama ini tidak ada (sangat jarang) transaksi pasarnya karena jasa-jasa lingkungan tersebut merupakan barang publik, dimana semua pihak yang memanfaatkan jasa lingkungan tersebut tidak harus melakukan pembayaran kepada pengelola hutan. Kajian ini berupaya merumuskan sistem neraca pembangunan yang mengintegrasikan nilai tambah produksi, deplesi, degradasi, dan nilai ekonomi jasa lingkungan. Dengan demikian, nantinya akan dapat diperoleh alternatif kebijakan fiskal yang ramah lingkungan (*green fiscal policy*) yang dapat mentransformasikan nilai ekonomi potensial menjadi nilai ekonomi riil yang rasional dan terukur.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan beberapa alternatif skema kebijakan fiskal pro-lingkungan (*green fiscal policy*), dengan cara mengevaluasi kebijakan fiskal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan dan mengembangkan konsep neraca pembangunan yang lebih ramah lingkungan.